



# Optimalisasi Gelar Operasi Keamanan Laut Berbasis Intelijen Kolaboratif di Kawasan Obvitnas Morowali

Mega Yudha Prabowo\*<sup>1</sup>, Heru Syamsul Hidayat<sup>2</sup>, Diki Atriana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [lanangduosakti55@gmail.com](mailto:lanangduosakti55@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-03	This study examines the optimization strategy for maritime security operations deployment by the Second Fleet Command (Koarmada II) in Morowali Waters, a strategic National Vital Object (Obvitnas) area serving as the center of the world's nickel downstream industry. The demand for a permanent presence of the Republic of Indonesia Warships (KRI) currently collides with the reality of technical readiness of a fleet dominated by aging platforms and the need for resource efficiency in conventional patrol patterns. The purpose of this study is to analyze factual conditions and formulate adaptive operational policies and strategies to circumvent these limitation dynamics. Using a descriptive qualitative method with a thematic analysis approach assisted by NVivo software, this study found that the capability gap has triggered the risk of a vacuum of patrol. The conclusion emphasizes that security effectiveness can no longer rely solely on massive physical presence but requires a transformation towards the Intelligence-Led Operations (ILO) paradigm, the optimization of surveillance technology as a force multiplier, and strong synergy between base units and maritime intelligence.
<b>Keywords:</b> <i>Operational Deployment;</i> <i>Maritime Security;</i> <i>Intelligence-Led Operations;</i> <i>Morowali;</i> <i>KRI Limitations.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-03	Penelitian ini mengkaji strategi optimalisasi gelar operasi keamanan maritim oleh Komando Armada (Koarmada) II di Perairan Morowali, sebuah kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) strategis yang menjadi pusat hilirisasi industri nikel dunia. Tuntutan kehadiran unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) secara permanen saat ini berbenturan dengan realitas kesiapan teknis armada yang didominasi oleh platform tua ( <i>aging platform</i> ) serta kebutuhan efisiensi sumber daya pada pola patroli konvensional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi faktual dan merumuskan kebijakan serta strategi operasional yang adaptif guna menyalasi dinamika keterbatasan tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo, penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan kapabilitas telah memicu risiko kekosongan pengawasan ( <i>vacuum of patrol</i> ). Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas pengamanan tidak dapat lagi bertumpu pada intensitas kehadiran fisik secara masif semata, melainkan menuntut transformasi menuju paradigma <i>Intelligence-Led Operations</i> (ILO), optimalisasi teknologi surveilans sebagai <i>force multiplier</i> , dan sinergitas yang kuat antara unsur pangkalan dan intelijen maritim.
<b>Kata kunci:</b> <i>Gelar Operasi;</i> <i>Keamanan Maritim;</i> <i>Intelligence-Led Operations;</i> <i>Morowali;</i> <i>Keterbatasan KRI.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia membawa konsekuensi logis berupa tingginya dinamika ancaman dan kerentanan maritim, terutama di jalur-jalur strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Salah satu pusat gravitasi ekonomi (*center of gravity*) baru di kawasan ini adalah Perairan Morowali, Sulawesi Tengah, yang menjadi lokasi Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sebagai kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang menopang transisi energi global dan perekonomian negara, stabilitas keamanan perairan di sekitarnya merupakan prasyarat mutlak.

Dalam doktrin keamanan maritim, jaminan stabilitas tersebut diwujudkan melalui kehadiran

unsur kekuatan laut (*naval presence*) guna memberikan efek penangkalan atau *deterrence* (Booth, 2014; Till, 2018). Komando Armada II (Koarmada II), selaku pemegang komando wilayah perairan tengah, memikul tanggung jawab atas gelar operasi ini. Namun, realitas operasional menunjukkan adanya dilema strategis. Tingginya intensitas ancaman asimetris (seperti penyelundupan dan pelanggaran wilayah) berhadapan langsung dengan keterbatasan sumber daya operasional yang krusial. Sebagian besar unsur KRI yang beroperasi tergolong dalam *aging platform* (kapal berusia tua), yang rentan mengalami penurunan keandalan mesin di tengah laut dan membutuhkan siklus pemeliharaan yang cukup panjang.

Kondisi tersebut memberikan tantangan lebih lanjut pada aspek pola operasi. Doktrin patroli sektor konvensional yang mengharuskan KRI berlayar secara terus-menerus menuntut alokasi sumber daya logistik yang sangat besar. Data operasional menunjukkan konsumsi logistik cair mencapai  $\pm 30.000$  liter per hari per kapal korvet pada pola konvensional, dibandingkan hanya  $\pm 8.000$  liter per hari pada pola terarah berbasis intelijen. Penggunaan sumber daya yang belum optimal ini, apabila tidak didukung oleh penyajian informasi intelijen yang presisi, berpotensi memicu terjadinya *vacuum of patrol* (kekosongan pengawasan taktis) yang sewaktu-waktu dapat dieksploitasi oleh aktor ancaman.

Fenomena ini dapat dibedah melalui Teori Manajemen Strategi Militer yang menekankan bahwa ketidakseimbangan antara *Ends* (Tujuan: keamanan Obvitnas), *Ways* (Cara: pola operasi), dan *Means* (Sarana: Kesiapan KRI) secara inheren akan menghasilkan *Risk* (Risiko) berupa kerentanan keamanan (Lykke Jr., 1989). Ketika kuantitas *Means* tidak dapat diakselerasi secara instan, variabel utama yang harus direayasa adalah *Ways*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi faktual gelar operasi Koarmada II dan merumuskan strategi operasional adaptif—terutama melalui integrasi konsep *Network Centric Warfare* dan pemanfaatan sistem C6ISR—guna menyiasati dinamika keterbatasan KRI di Perairan Morowali (Alberts, Garstka & Stein, 1999).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus (Creswell & Creswell, 2018). Fokus unit analisis adalah sistem gelar operasi keamanan laut Koarmada II di wilayah Perairan Morowali. Subjek penelitian (informan kunci) ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yang mencakup klaster perencana tingkat komando, klaster pangkalan kewilayahan, serta klaster pelaksana taktis.

Pengumpulan data primer dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026 melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan secara langsung di Posal Morowali dan Puskodal. Data sekunder dihimpun dari laporan operasional dan dokumen regulasi terkait. Proses pengolahan dan analisis data dikelola menggunakan perangkat lunak *Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) NVivo 12. Pendekatan analisis tematik dengan model interaktif

digunakan untuk mereduksi, mengklasifikasi (koding), dan memvisualisasikan data (melalui *Word Cloud* dan *Project Map*), guna menarik kesimpulan strategis yang valid dan berbasis bukti (Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa mengungkap gambaran objektif mengenai kondisi gelar operasi saat ini. Secara konseptual, kondisi ini dievaluasi melalui Teori Manajemen Strategi Militer yang menyoroti keseimbangan *Ends-Ways-Means-Risk* (EWMR):

1. Tujuan Strategis (*Ends*): Terdapat konsensus yang utuh di seluruh lini komando bahwa sasaran utama (*center of gravity*) dari kehadiran armada adalah perlindungan eksklusif terhadap Obvitnas IMIP, yang merupakan urat nadi rantai pasok global dan kedaulatan ekonomi maritim.
2. Kesenjangan Kapabilitas (*Means*): Tuntutan perlindungan yang mengharuskan *continuous presence* (kehadiran fisik 24 jam) berbenturan tajam dengan keterbatasan instrumen di lapangan. Armada didominasi oleh *aging platform* yang memicu *unpredictable operational downtime* (waktu jeda operasional yang tidak terduga). Hal ini bermuara pada penurunan *technical readiness rate* atau tingkat kesiapan teknis kapal perang yang ditugaskan.
3. Inefisiensi Pola Operasi (*Ways*): Pendekatan doktrin "Patroli Sektor" secara konvensional terbukti tidak merepresentasikan prinsip efisiensi yang berkelanjutan (*unsustainable*). Data empiris mengindikasikan bahwa penerapan patroli yang terus-menerus menuntut penyerapan logistik cair yang sangat masif. Sebaliknya, penerapan pola operasi yang lebih terarah mampu mereduksi kebutuhan logistik tersebut hingga 73%. Temuan ini memvalidasi urgensi rasionalisasi pergerakan unsur di laut (Lykke Jr., 1989).
4. Risiko Keamanan (*Risk*): Ketidakseimbangan antara tingginya beban perlindungan (*Ends*) dan minimnya kapabilitas KRI yang siap (*Means*) secara otomatis mengekspos wilayah pada risiko keamanan nyata, yakni terjadinya *vacuum of patrol* atau kekosongan jeda pengawasan

yang berpotensi dimanfaatkan oleh aktor ancaman.

Selain itu, hasil triangulasi sumber lintas kepangkatan mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang membentuk efektivitas operasi di Perairan Morowali. Faktor kendala utama yang menciptakan "spiral negatif" meliputi dominasi *aging platform* yang membatasi kesiapan teknis, dinamika alokasi sumber daya operasional yang mempengaruhi siklus pemeliharaan, serta integrasi siklus intelijen maritim (Intelmar) yang masih kerap menghasilkan produk *post-factum* (laporan pasca-kejadian) alih-alih *actionable intelligence* yang *real-time*. Di sisi lain, faktor pendorong potensial mencakup keberadaan aset teritorial jaringan pangkalan kewilayahan, konsensus komandan lapangan untuk beralih ke operasi berbasis data, serta tingginya nilai geostrategis IMIP yang dapat digunakan sebagai penguat justifikasi kebijakan di tingkat pusat.

## B. Pembahasan

Mempertimbangkan kompleksitas hambatan internal dan besarnya peluang lingkungan operasional dari temuan di atas, rancangan pengamanan Perairan Morowali menuntut reorientasi strategis yang transformatif (*Turn-Around Strategy*). Pembahasan mengenai langkah operasional adaptif ini dijabarkan ke dalam tiga inisiatif utama:

### 1. Inisiasi Kemitraan Strategis dan Sinergitas Kewilayahan (*Public-Private Synergy*)

Dalam rangka optimalisasi dukungan operasional di tengah dinamika *aging platform*, kekuatan pertahanan pangkalan (*Base Defense*) selanjutnya disinergikan dengan pemangku kepentingan industri dan maritim setempat. Koarmada II perlu memformalisasi kemitraan strategis (misal melalui Perjanjian Kerja Sama) dengan pengelola IMIP serta kementerian terkait untuk fasilitasi infrastruktur pangkalan aju (*forward base*), dukungan pemeliharaan ringan, maupun logistik operasional di sekitar Morowali. Hal ini akan memotong waktu transit KRI ke pangkalan induk dan memperpanjang *time-on-station* di sektor operasi secara efisien tanpa mengorbankan independensi dan otoritas komando TNI AL.

### 2. Penguatan Narasi Kebijakan (*Leverage*) Berbasis Nilai Strategis Obvitnas

Secara kebijakan, kerentanan aset maritim harus dimitigasi melalui peningkatan kapabilitas modern. Nilai keekonomian dan posisi vital IMIP dalam rantai pasok global harus dikapitalisasi menjadi penguatan narasi kebijakan (*strategic capability leverage*). Argumentasi pengembangan postur pertahanan harus digeser dari sekadar pemenuhan kebutuhan operasional rutin menjadi investasi perlindungan aset strategis nasional. Narasi ini esensial untuk mempercepat penentuan prioritas pada program peremajaan dan modernisasi platform KRI yang ditugaskan khusus di titik-titik *chokepoint* perekonomian strategis.

### 3. Transformasi Menuju *Intelligence-Led Operations* (ILO) & Optimalisasi Surveilans

Ini merupakan strategi adaptasi yang paling krusial. Dalam kerangka *economy of force*, keterbatasan ketersediaan sarana gelar (KRI) harus dikompensasi dengan pencapaian keunggulan informasi atau *information superiority* (Alberts, Garstka & Stein, 1999). Operasi selanjutnya tidak lagi berorientasi pada rutinitas kehadiran fisik (*presence-based*), melainkan bertransformasi menjadi *Intelligence-Led Operations* (ILO), yaitu operasi yang dipandu dan digerakkan oleh kepastian data intelijen.

Untuk merealisasikan konsep ILO, optimalisasi teknologi surveilans mutlak diperlukan sebagai *force multiplier* jangka pendek. Penggunaan wahana nirawak (*drone/UAV* maritim), integrasi radar pantai pesisir, dan *Automatic Identification System* (AIS) yang disentralisasi ke dalam Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) terpadu akan mereduksi beban pengawasan laut secara langsung. Dengan terciptanya *Common Operational Picture* (COP) yang jernih, KRI dapat disiagakan secara lebih efisien di pangkalan aju terdekat (*standby*), dan baru bermanuver manakala terdapat mandat *actionable intelligence* untuk melakukan penyergapan (*intercept*) sasaran secara terarah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penyelenggaraan gelar operasi pengamanan oleh Koarmada II di Perairan Morowali

saat ini menghadapi dinamika struktural yang menuntut keseimbangan antara tingginya beban perlindungan kawasan Obvitnas dengan ketersediaan armada yang dominan berusia tua (*aging platform*). Mengandalkan pola patroli kehadiran fisik secara konvensional dinilai tidak lagi selaras dengan prinsip efisiensi sumber daya dan kelincihan operasi di era modern. Oleh karena itu, efektivitas operasi sekaligus mitigasi terhadap risiko kekosongan pantauan taktis (*vacuum of patrol*) hanya dapat dicapai secara berkelanjutan melalui transformasi menuju paradigma *Intelligence-Led Operations* (ILO). Pendekatan ini menuntut optimalisasi sistem teknologi surveilans pesisir sebagai unsur *force multiplier*, yang didukung penuh oleh penguatan kemitraan strategis dan sinergitas antara unsur pangkalan dengan komunitas intelijen maritim.

## B. Saran

Disarankan kepada institusi pemangku kebijakan pertahanan laut untuk secara bertahap menyempurnakan doktrin operasional maritim yang lebih menitikberatkan pada konsep *Intelligence-Led Operations*, guna memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pergerakan unsur KRI di laut. Di tingkat komando pelaksana, percepatan integrasi Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang mampu menganalisis dan mendistribusikan *actionable intelligence* secara *real-time* perlu dijadikan prioritas teknis. Selanjutnya, pada tingkat komando kewilayahan, diharapkan agar dapat terus memperluas kerja sama lintas instansi (seperti Bakamla dan Polairud) guna menerapkan skema pembagian beban pengawasan (*burden-sharing*), sehingga proyeksi kekuatan dan penegakan hukum dapat terlaksana secara lebih proporsional dan presisi.

## DAFTAR RUJUKAN

Alberts, D. S., Garstka, J. J., & Stein, F. P. (1999) *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority*. Washington, D.C.: CCRP Publication Series.

Anidia, B. N. (2023) 'Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Melalui Operasi Militer Selain Perang', *Jurnal Skripsi Universitas Mataram*, pp. 1-15.

Booth, K. (2014) *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge. (Buku Teks).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th edn. Los Angeles: SAGE. (Buku Teks).

Lykke Jr., A. F. (1989) 'Defining Military Strategy', *Military Review*, 69(5), pp. 3-8.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edn. Thousand Oaks: SAGE Publications. (Buku Teks).

Fujiyanto, Y. (2024) 'Analisis Efektivitas Opskamla Koarmada I Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Penegakan Hukum dan Menjaga Keamanan Laut', *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan (JIKK) Seskoal*, 7(2), pp. 16-25.

Mandaku, H. and Samad, M. Y. (2022) 'Potensi Ancaman Perang Hibrida di Indonesia Pada Tahun 2023: Aktor, Metode, Dampak', *Jurnal Cendekia Waskita*, 6(2), pp. 184-194.

Suharyanto, A. (2021) *Desain Kurikulum Pendidikan Orang Dewasa di Era Digital*. Bandung: Alfabeta. (Buku Teks).

Tanjung, A. P., Simanjuntak, M. and Alam, T. M. (2020) 'Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut', *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1), pp. 78-90.

Till, G. (2018) *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. 4th edn. London: Routledge. (Buku Teks).